

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Aditya, U. R. (2015). *Azas Azas Pemidanaan*. Pustaka Penerbit Semarang.
[https://doc-pak.undip.ac.id/4949/1/Buku Azaz dan Tujuan Pemidanaan_Umi Rozah.pdf](https://doc-pak.undip.ac.id/4949/1/Buku_Azaz_dan_Tujuan_Pemidanaan_Umi_Rozah.pdf)
- Dr Wahyu Prijo Djatmiko. (2020). *Politik Kriminal Peberantasan Tindak Pidana Korupsi Persepektif Budaya Hukum* (Thafa media (ed.)). Penerbit Tahafa media.
- Jimly Asshiddiqie. (2007). Penegakkan Hukum. *Writer*, 48(Tabela 1), 1–2.
- M. Zen Abdullah. (2009). *Pidana Penjara Eksistensi dan Efektifitasnya Dalam Upaya Resosialisasi Narapidana* (Cetakan Pe). Hasta Cipta Mandir.
- Dwidja Priyatno. (2006). *Sistem Pelaksanaan Penjara Di Indonesia* (2006 ed.).
- Eko Suponyono. (2001). *Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban*. 29–41.
- Ikhwan Fahrojih. (2016). *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Cita intrans Selaras.
- Tiyani, M. S. (2020). *Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. 6, 1–9.
- Suseno, J. B. (2010). *PANDANGAN TENTANG HUKUM DAN KEADILAN*. 1–23.
- Wahyuni, D. F. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. In *Perpustakaan Nasional*.

II. Peraturan PerUndang-Undangan

- Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- PERMA 1/2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi

III. Sumber Lainnya

- Adinda Anisa Putri Noor Oetari, & Ade Mahmud. (2022). Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 96–103. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.526>
- Aditya, U. R. (2015). *Azas Azas Pidanaaan*. Pustaka Penerbit Semarang. [https://doc-pak.undip.ac.id/4949/1/Buku Azas dan Tujuan Pidanaaan_Umi Rozah.pdf](https://doc-pak.undip.ac.id/4949/1/Buku%20Azas%20dan%20Tujuan%20Pidanaaan_Umi%20Rozah.pdf)
- Alin, F. (2017). Sistem Pidana Dan Pidanaaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>
- Anjari, W. (2023). *APPLICATION OF AGGRAVATION OF PUNISHMENT*. 15(2), 263–281. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.507>
- Apriani, L. R. (2010). Penerapan Filsafat Pidanaaan Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 3(1), 1–14. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/11>
- Bambang Joyo Supeno. (2023). Implementasi Pidanaaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Penegakkan Hukum. In *Laporan tugas akhir* (Vol. 4, Nomor 1).
- Batubara, J. (2021). Wabah Korupsi di kala Pandemi : Pidanaaan Tindak Pidana Korupsi Selama Pandemi sebagai Refleksi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Anti Korupsi*, 3(1), 113–138. <https://doi.org/10.19184/jak.v3i1.27135>
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>
- CNN Indonesia. (2020). *Kasus Tindak Pidana Korupsi Juliari P Batubara*. <https://www.cnnindonesia.com/>. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206015241-12-578488/kronologi-mensos-juliari-jadi-tersangka-kasus-bansos-corona>
- CNN Indonesia. (2021). *Kasus Tindak Pidana Korupsi Bupati Kabupaten Bandung Barat*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211104180531-12-716763/bupati-bandung-barat-nonaktif-aa-umbara-divonis-5-tahun-bui>
- Dr Wahyu Prijo Djatmiko. (2020). *Politik Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perseptif Budaya Hukum* (Thafa media (ed.)). Penerbit Tahafa media.

- Dwidja Priyatno. (2006). *Sistem Pelaksanaan Penjara Di Indonesia* (2006 ed.).
- Eko Suponyono. (2001). *Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban*. 29–41.
- Faisal Santiago. (2017). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(1), 23–43.
- Fasrial, R. S. (2015). *Implementasi Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama)*.
- Fazzan. (2015). Korupsi Di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, 14(2), 146–165. 327-618-2-PB.pdf
- Gunarto, M. P. (2009). Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(1), 93–108. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16248>
- Haidar Rais. (2021). *Kronologi Dugaan Korupsi Bansos yang Dilakukan Bupati Bandung Barat Aa Umbara*. prfmnews. <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-131706685/ini-kronologi-dugaan-korupsi-bansos-yang-dilakukan-bupati-bandung-barat-aa-umbara>
- Ikhwan Fahrojih. (2016). *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Cita intrans Selaras.
- Jimly Asshiddiqie. (2007). Penegakkan Hukum. *Writer*, 48(Tabela 1), 1–2.
- M. Zen Abdullah. (2009). *Pidana Penjara Eksistensi dan Efektifitasnya Dalam Upaya Resosialisasi Narapida* (Cetakan Pe). Hasta Cipta Mandiri.
- Mubarok, N. (2015). Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18(2), 296–323. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/233>
- Mudzakkir, T. K. B. (2008). Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan). *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1–117. https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf
- Muhammad, Bintarto, I., Abubakri, R., & Zulhaj, A. (2021). *Politik Hukum Penegakan Tindakan Korupsi Dimasa Pandemi Covid-19 Kata korupsi diambil dari bahasa latin yaitu corruptio atau corruptus yang kemudian diterjemahkan oleh banyak negara , adapun istilah korupsi diambil dari bahasa belanda yakni corruptie , ko. 10(2), 349–360.*
- Mukaromah, D. A., & Kusuma, L. I. (2013). Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Ajaran Sosialis Oleh Karl Marx. *Recidive*, 2(2), 178–184.

- N.Marbun, A. (2017). Konsep Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *MaPPI FHUI*, 18.
- Ni Komang Sri Herawati Octa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani. (2022). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Pejabat Negara. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 424–429. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4956.424-429>
- Nugraha, R. S. (2020). Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Juliari Batubara). *PALAR (Pakuan Law Review)*, 6(2), 59–73. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>
- Nursapiah. (2020). Penelitian Kualitatif. *penelitian kualitatif*, 1(1), 199. [http://repository.uinsu.ac.id/9105/1/BUKU METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF DR. NURSAPIA HARAHAP, M.HUM.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/9105/1/BUKU%20METODOLOGI%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DR.%20NURSAPIA%20HARAHAP,%20M.HUM.pdf)
- Resi Maldini. (2019). Perbandingan Sistem Pemidanaan Di Belanda Dengan Di Indonesia Dalam Upaya Penanggulangan Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 263. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276>
- Santoyo. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199–204. <https://bit.ly/2FhMAKf>
- Saputra, E. P., Artadi, I., & Sanusi, S. (2022). Pemidanaan Double Track Sistem Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Hukum Responsif*, 13(2), 105. <https://doi.org/10.33603/responsif.v13i2.7363>
- Setiyani, M. S. (2020). *Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. 6, 1–9.
- Suseno, J. B. (2010). *PANDANGAN TENTANG HUKUM DAN KEADILAN*. 1–23.
- Syafril Mallombasang. (2015). *Humanis*. 1.
- Syaiful Bahkri. (2019). pembaharuan hukum pidana. In <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Wahyudi, S. T. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), 207. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234>
- Wahyuni, D. F. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. In *Perpustakaan Nasional*.

- Wiranti, Y., & Arifin, R. (2020). Tantangan dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 20(1), 45. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.3822>
- Yanto, O. (2017). Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Syah Kuala Law Journal*, 1(2), 18–36. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8471>
- Zenno, M. P. (2017). Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 10(3), 257. <https://doi.org/10.29123/jy.v10i3.266>